



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
DINAS KESEHATAN KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2021**

S

**BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2022**

Kata Pangantar

Puji dan syukur kehadirat Allah Swt Tuhan seru sekalian alam, atas berkat-Nya jualah kita masih diberikan nikmat sehat walafiat. LAKIP merupakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai alat penilaian kinerja secara kuantitatif dan wujud akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung menuju terwujudnya Good Governance dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Penyusunan LAKIP Tahun 2021 dilaksanakan atas dasar analisis pengukuran capaian kinerja program dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung tahun 2020 dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Semoga Laporan Akuntabilitas ini bermanfaat dan akan digunakan sebagai bahan peningkatan serta perbaikan kinerja selanjutnya.

Bandar Lampung, Februari 2022

Pit. KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA BANDAR LAMPUNG



DESTI MEGA PUTRI, SP, MT

Nip. 19691202 199503 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1.	Latar Belakang	1
1.2.	Landasan Hukum	2
1.3.	Tugas Pokok dan Fungsi	3
1.4.	Analisa Aspek Strategi	6
1.5	Masalah Utama (isu Startegis)	8
BAB II	VISI MISI,TUJUAN,SASARAN,STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	10
2.1.	Visi dan Misi Organisasi	10
2.2.	Tujuan dan sasaran Jangka Menengah	11
2.3.	Strategi dan Kebijakan	13
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	16
3.1	Evaluasi dan Analisis Kinerja	16
3.2	Akuntabilitas Keuangan	26
BAB IV	PENUTUP	56
4.1	Kesimpulan	56
7	4.2 Pemecahan Masalah	57

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governmance) sangat dibutuhkan tuntutan pelayanan publik kearah yang transparan, partisipasif dan akuntabel. Penyusunan Laporan Kinerja pemerintah daerah adalah salah satu cara untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Undang - undang nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme menyatakan Akuntabilitas sebagai salah satu azas umum dalam penyelenggaraan Negara. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengarahkan bahwa pelaksanaan pemerintah harus berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab.

Penyusunan Laporan LAKIP mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Perjanjian Kinerja, merupakan deskripsi atas hasil kinerja dari seluruh Program dan Kegiatan yang didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan, termasuk di dalamnya aspek keuangan.

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung merupakan tolak ukur keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, kebijakan dan pengembangan kesehatan masyarakat sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak - pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga

kepercayaan masyarakat terhadap eksistensi suatu lembaga. LAKIP sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program tahun sebelumnya dan juga sebagai bahan dalam penyusunan program/kegiatan untuk tahun berikutnya.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang No. 28 Tahun 1999 penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi , kolusi dan nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Mendagri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Mendagri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
12. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung ;
13. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung; Peraturan.

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung merupakan instansi yang dibentuk berdasarkan Perda Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung. Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung adalah unsur pelaksana pemerintah daerah kota yang dipimpin oleh Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota. Dalam melaksanakan tugas pokok dan kewajiban tersebut, Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung mempunyai fungsi :

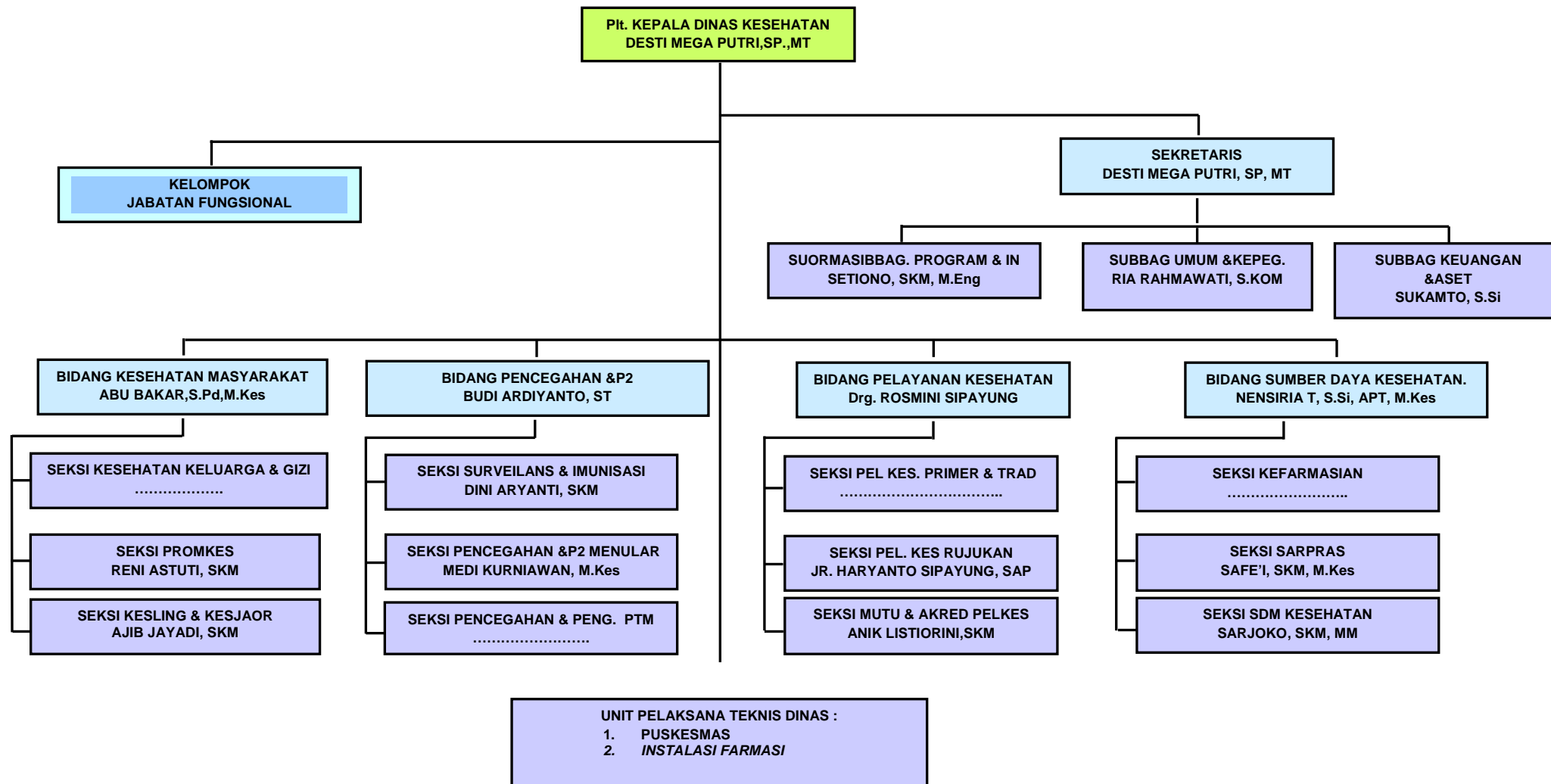
- 1) Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkupnya tugasnya;
- 2) Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup dan tugasnya;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelapoean sesuai dengan lingkup tugasnya

- 4) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :

1. Sekretaris Dinas;
2. Bagian Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Program dan Informasi;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan dan aset.
3. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi:
 - a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 - b. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja Olah raga.
4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit membawahi:
 - a. Seksi surveilans dan Imunisasi;
 - b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
 - c. Seksi Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular.
5. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi:
 - a. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional;
 - b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
 - c. Seksi Mutu dan akreditasi Pelayanan Kesehatan.
6. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahi :
 - a. Seksi Kefarmasian
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana;
 - c. Seksi SDM Kesehatan.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN KOTA BANDAR LAMPUNG



B. ANALISA ASPEK STRATEGI

Aspek strategi adalah aspek yang mendukung dan merupakan sumber daya dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan menuju perwujudan visi dan misi Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, aspek – aspek tersebut adalah :

1. Aspek Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung pada tahun 2021, termasuk UPT sebanyak 1.139 orang, meningkat dibandingkan dengan tahun 2017 sebanyak 987 orang. Sebagian besar merupakan tenaga kesehatan dan terdistribusi di UPT Dinas Kesehatan seperti UPT Puskesmas, UPT Gudang Farmasi, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1.
Jenis Tenaga Kesehatan Berdasarkan Pangkat & Golongan
Pada Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Tahun 2021

No	PANGKAT/GOLONGAN	Jumlah
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	4
2	Pembina Tk. I (IV/b)	15
3	Pembina, (IV/a)	86
4	Penata TK I (III/d)	255
5	Penata (III/c)	161
6	Penata Muda T.K I (III/b)	267
7	Penata Muda (III/a)	205
8	Pengatur Tk. I (II/d)	75
9	Pengatur (II/c)	61
10	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	8
11	Pengatur Muda (II/a)	2
	Jumlah	1.139

Sumber Data : Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2021

Tabel 1.2.
Jenis Tenaga Kesehatan Berdasarkan Jenis Ketenagaan Pada Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Tahun 2021

No.	Jabatan	Jumlah
	Tenaga Kesehatan	
1	Dokter Umum	148
2	Dokter Gigi	58
3	Apoteker	41
5	Bidan	335
6	Nutrisionis	42
8	Sanitarian	41
11	Perawat	340
13	Kesehatan Masyarakat	41
14	Non Kesehatan	93
<i>Jumlah</i>		1.139

Sumber Data : Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian tahun 2021

TABEL 1.3.
Jenis Tenaga Kesehatan Berdasarkan Jenis Pendidikan Pada Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Tahun 2021

No.	Pendidikan	Jumlah
1	S-3	0
2	S-2	41
3	S1	432
4	D IV	126
5	D III	450
6	D I	14
7	SLTA	74
8	SLTP	2
<i>Jumlah</i>		1.139

Sumber Data : Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2021

2. Aspek Sarana Pelayanan Kesehatan

Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsi, Kantor Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung memiliki sarana dan prasarana berupa Puskesmas dan jaringannya yaitu, Puskesmas Pembantu, Poskeskel,

Posyandu dan Puskesmas keliling. Secara rinci jumlah sarana dan prasarana dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.4.
Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan
di Kota Bandar Lampung Tahun 2021

No.	Uraian	Jumlah
1	Puskesmas a. Puskesmas Rawat Inap b. Puskesmas Non Rawat Inap	13 18
2	Puskesmas Pembantu	50
3	Posyandu	704
4	Poskeskel	126
5.	Ambulan/Puskesmas keliling	63

Sumber Data : Sub. Program dan Informasi Tahun 2021

3. Sumber Daya Keuangan

Tabel 1.5.
Alokasi Pembiayaan Kesehatan Dinas
Kesehatan Kota Bandar Lampung T.A 2021

No	Jenis Belanja	Jumlah Anggaran
1.	BELANJA OPERASI	303,159,207,782
2.	BELANJA MODAL	29,946,473,392
	JUMLAH	333,105,681,174

Sumber Data : Sub Bag Program dan Informasi Tahun 2021

F. PERMASALAHAN UTAMA (ISU-ISU STRATEGIS)

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan pembangunan di bidang kesehatan dapat diidentifikasi permasalahan bidang kesehatan dapat dilihat pada tabel 1.6 sebagai berikut :

Tabel 1.6.
Permasalahan Bidang Kesehatan
di Kota Bandar Lampung T.A 2021

No	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	Masih rendahnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. kasus kematian ibu (hamil dan melahirkan) 2. Adanya kasus kematian bayi & balita 3. Kasus Baru penyakit menular Covid 19 4. Meningkatnya kasus penyakit yang disebabkan kepadatan penduduk yang tinggi dan masalah lingkungan (TBC, DBD) 5. Meningkatnya kasus penyakit degeneratif akibat situasi kondisi perkotaan, perubahan pola hidup cenderung meningkat (darah tinggi, diabetes, stroke dll) 6. Meningkatnya kasus HIV akibat penyalahgunaan narkoba dan penyimpangan perilaku seksual) 7. Mutu, akses pelayanan kesehatan belum maksimal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya penyakit penyerta seperti hipertensi pada ibu hamil 2. Masih adanya kasus kekurangan gizi (underweight) pada bayi dan anak balita. 3. Penerapan protokol kesehatan masih belum dilakukan maksimal oleh masyarakat 4. Masih rendahnya Kualitas kesehatan lingkungan 5. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap penyakit TBC 6. Masih rendahnya peran petugas kesehatan dalam penemuan kasus TBC 7. Pola hidup masyarakat kurang sehat /tidak ber PHBS (merokok,kurang aktifitas fisik,makanan kurang sehat) 8. Penggunaan jarum suntik bersamaan pada pengguna narkoba, perilaku seks bebas, penyimpangan perilaku seksual (LSL, dll) 9. Belum tercukupinya kebutuhan beberapa jenis tenaga fungsional kesehatan (kesehatan lingkungan, kefarmasian, analisis laboratorium, rekam medik) 10. beberapa jenis tenaga fungsional kesehatan (kesehatan lingkungan, kefarmasian, analisis laboratorium, rekam medik) 11. Kualitas sarana dan prasarana fasilitas kesehatan belum maksimal 12. Pembiayaan kesehatan belum optimal

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

2.1. Visi Dan Misi Kota Bandar Lampung

Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2021 adalah : “Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Unggul, dan Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Kerakyatan”.

Penjabaran Visi tersebut diatas meliputi :

1. **Bandar Lampung** : Meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota Bandar Lampung dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas –batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1682 hingga sekarang
2. **Sehat** : Kota Bandar Lampung sebagai kota yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah;
3. **Cerdas** : Sikap dan kondisi masyarakat kota cerdas/pintar yang membantu masyarakat yang berada di dalamnya dengan mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan membrikan informasi yang tepat kepada masyarakat/lembaga dalam melakukan kegiatannya ataupun mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya;
4. **Beriman** : Sikap dan kondisi masyarakat yang bertaqwa, dan beramal shaleh serta mewujudkan masyarakat yang taat hukum, bermoral, dan berakhlak mulia;
5. **Berbudaya** : Kondisi kota yang mengutamakan kearifan/budaya lokal dalam berbagai sektor;

6. **Unggul** : Menjadi yang terbaik dan terdepan dengan mempertahankan pencapaian sebelumnya serta menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya terobosan perubahan bagi kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung;
7. **Berdaya Saing** : Kondisi Kota yang memiliki kemampuan untuk menciptakan nilai tambah pertumbuhan ekonomi untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung;
8. **Ekonomi Kerakyatan** : Ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan yang dengan secara swadaya mengelola sumberdaya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya.

Adapun misi yang disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan tersebut diatas meliputi :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan masyarakat;
3. Meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial;
4. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah dengan berlandaskan pada ekonomi kerakyatan;
5. Mengembangkan masyarakat agamis, berbudaya, dan mengembangkan budaya daerah;
6. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih serta berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha.

2.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya

akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki kritikal poin dalam penyusunan Renstra.

Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dalam upaya melaksanakan visi dan misi Walikota dan Wakil Waliota Bandar Lampung telah menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dijalankan. Penetapan tujuan dan sasaran ini tercantum dalam Renstra Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung yang tentunya harus selaras dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Uraian tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2021 dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan diuraikan sebagai berikut:

2.2.1 Tujuan

Tujuan jangka menengah Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2021 adalah Meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat

2.2.2. Sasaran

Berdasarkan sasaran yang ingin dicapai kemudian ditetapkan indikator sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2021 adalah :

1. Sasaran 1 yaitu Meningkatkan Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat dengan 4 indikator sasaran yaitu :
 - 1) Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup
 - 2) Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup
 - 3) Prevalensi kekurangan gizi (*underweight*) pada anak balita (persen)
 - 4) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (bawah dua tahun) (persen)

2. Sasaran 2 yaitu Peningkatan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular dengan 3 indikator sasaran yaitu :
 - 1) Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk
 - 2) Persentase penemuan penyakit tidak menular (Diabetes Melitus)
 - 3) Prevalensi tekanan darah tinggi (persen)
3. Sasaran 3 yaitu Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan dengan 2 indikator sasaran yaitu :
 - 1) Persentase Puskesmas yang terakreditasi
 - 2) Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan gratis.
4. Sasaran 4: Meningkatnya kesadaran masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat dengan 1 indikator sasaran yaitu :
Persentase Rumah Tangga Ber- PHBS

2.3. Strategi Dan Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana Pemerintah Kota Bandar Lampung mencapai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan efektif dan efisien. Dalam RPJMD Kota Bandar Lampung, strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2021.

Rumusan strategi menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran program pembangunan bidang kesehatan akan dicapai oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Kesehatan. Rumusan strategis ini selanjutnya dijabrakan dalam pelaksanaan kebijakan pembnagunan bidang kesehatan di Kota Bandar Lampung. Secara lengkap tujuan, sasaran, rumusan strategi dan

kebijakan jangka menengah Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Periode 2016-2021

Visi		: Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Unggul dan Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Kerakyatan								
Misi		: Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat								
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan						
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Status Gizi Masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Mengoptimalkan upaya pelayanan gizi dan kesehatan secara komprehensif meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	1.	Mempercepat perbaikan gizi masyarakat dan mengurangi prevalensi kekurangan gizi pada balita					
				2.	Meningkatkan akses dan mutu continuum of care pelayanan ibu dan anak yang meliputi, kunjungan ibu hamil dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas pelayanan kesehatan serta penurunan kasus kematian ibu					
				3.	Akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja dan lanjut usia yang berkualitas					
2.		Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	Mengoptimalkan upaya penanggulangan penyakit menular dan tidak menular secara komprehensif meliputi upaya promotif, preventif, kuratif di fasilitas pelayanan kesehatan dasar	4.	Meningkatkan upaya promotif dan preventif termasuk pencegahan kasus baru penyakit menular (TBC, DBD, HIV, Malaria) dan penyakit tidak menular (penurunan faktor resiko biologi khusus penyakit darah tinggi, diabetes dan obesitas) dan kejadian luar biasa / wabah					
3.		Meningkatnya pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan	1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan terutama Puskesmas baik sarana prasarana maupun pelayanan kesehatan. 2. Mengoptimalkan sumber daya kesehatan yang meliputi pembiayaan, sumber daya manusia dan ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	5.	Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dasar melalui akreditasi Puskesmas, pengembangan guideline pelayanan kesehatan, termasuk pemenuhan dengan lima jenis tenaga kesehatan. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat, vaksin dan alat kesehatan di Puskesmas/pustu dan jaringannya					
				6.						
				7.	Menjamin keamanan. Khasiat, kemanfaatan dan mutu kefarmasian termasuk obat tradisional dan makanan					
8.	Terjaminnya Resiko bagi masyarakat terutama keluarga Miskin akibat Pengeluaran Biaya									

Visi		: Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Unggul dan Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Kerakyatan								
Misi		: Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat								
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan						
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
				kesehatan						
				9.	Pemantapan pelaksanaan jaminan kesehatan nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat (KIS))					
4.		Meningkatnya kesadaran masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk hidup bersih dan sehat melalui promosi kesehatan. 2. Meningkatkan peran petugas kesehatan dalam upaya promosi kesehatan 	<ol style="list-style-type: none"> 10. Meningkatkan promosi, sosialisasi, kampanye kesehatan melalui berbagai media (media cetak dan elektronik) 11. Meningkatkan kerjasama lintas sektor dan lintas program termasuk lembaga swasta untuk melakukan kampanye kesehatan. 						

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategi. Rincian pengukuran kinerja berisi indikator kinerja, target realisasinya, dan pencapaian target masing-masing kegiatan dan sasaran yang disajikan dalam bentuk formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), dilanjutkan dengan formulir Pengukuran Pencapaian sasaran (PPS). Penetapan indikator kinerja didasarkan pada kelompok: masukan (*inputs*), proses (*process*), keluaran (*outputs*) dan hasil (*outcomes*). Sedangkan satuan pengukuran masing masing indikator ditetapkan dalam bentuk: orang, rupiah, buah, hari dan sebagainya.

Berdasarkan sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan Visi, Misi dan Tujuan, kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (TAPKIN) tahun 2021

1. EVALUASI DAN ANALISIS KERJA

Evaluasi dan Analisis Kinerja Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Tahun 2021 didasarkan pada sasaran strategis dan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk mencapai indikator sasaran dimaksud Dinas Kesehatan telah menetapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan yang tercantum dalam Dokumen Perencanaan dan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Tahun 2021 baik bersumber dana dari APBD maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kesehatan tahun anggaran 2021. Secara rinci capaian

indikator sasaran Dinas Kesehatan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.3
Penetapan Kinerja Dinas Kesehatan
Kota Bandar Lampung TA 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian
1	Peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat	Penurunan AKI	5/100.000 kelahiran hidup	3/100.000 kelahiran hidup
		Penurunan AKB	5/1.000 kelahiran hidup	3/1.000 kelahiran hidup
		Prevalensi kekurangan gizi (<i>underweight</i>) pada anak balita (persen)	9,00%	4.09 (hasil Operasi timbang)
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (bawah dua tahun) (persen)	18,00%	6,65 (hasil Operasi timbang)
2	Peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk (CNR)	317/100.000 penduduk	207/100.000 penduduk
		Persentase orang dengan HIV	0,227%	0,21
		Persentase penemuan penyakit tidak menular (Diabetes Melitus)	60%	56%
		Prevalensi tekanan darah tinggi (persen)	20%	18,90
3	Peningkatan Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Persentase Puskesmas di Kota Bandar Lampung yang tersertifikasi, terakreditasi nasional	100%	100%
		Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan gratis	100%	100%
4	Meningkatnya kesadaran masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat	Jumlah rumah tangga ber-PHBS	85%	70%

Berdasarkan tabel capaian indikator sasaran Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut :

I. Sasaran I : Peningkatan Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat, dengan indikator sasaran :

A. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup

Kondisi Maternal tergambarkan dari besarnya Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan per 100.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2020 angka kematian ibu di Kota Bandar Lampung berjumlah 10 kasus (2 per 100.000 kelahiran hidup). Pada tahun 2021 jumlah kematian ibu melahirkan naik menjadi 15 kasus (3 per 100.000 kelahiran hidup). Jumlah kelahiran hidup tahun 2021 berjumlah 18.066 orang. Kenaikan jumlah kasus kematian ibu ini dikarenakan komplikasi covid 19 yang di tahun 2021 jumlah kasus caovid 19 meningkat. Meskipun demikian jumlah kasus ini masih relatif lebih rendah dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 5 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. Kondisi pandemi membatasi beberapa aktifitas dalam upaya penurunan kasus kematian ibu. Kegiatan seperti pertemuan peningkatan kapasitas petugas kesehatan, koordinasi lintas sektor dan kegiatan pelayanan kesehatan yang seharusnya dapat dilakukan secara langsung/tatap muka dibatasi untuk dilakukan karena untuk mencegah penularan covid 19 di masyarakat.

B. Angka kematian bayi dan balita per 1.000 kelahiran hidup

Angka kematian bayi dan balita di Kota Bandar Lampung dari tahun 2020 cenderung menurun dari tahun sebelumnya (tahun 2019). Angka kematian bayi dan balita per 1.000 kelahiran hidup di tahun 2020 berjumlah 34 kasus (1 kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup). Tahun 2019 angka

kematian bayi dan balita 36 kasus. Namun di tahun 2021 jumlah kasus kematian bayi dan balita kembali meningkat menjadi 60 kasus. (3 per 1.000 kelahiran hidup). Meski ada kenaikan kasus namun masih lebih rendah dibandingkan target yang ditetapkan yaitu 5 kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup. Namun demikian kenaikan kasus ini menjadi perhatian dan memerlukan upaya untuk penanggulangannya. Kenaikan kasus kematian bayi dan balita ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti masih rendahnya pemberian asi eksklusif, kualitas kesehatan lingkungan belum optimal, cakupan air bersih dan air minum yang masih rendah. Kondisi ini diperburuk lagi dengan pandemi covid 19. Banyaknya pembatasan kegiatan pelayanan kesehatan yang seharusnya dapat dilakukan secara langsung tatap muka namun tidak dapat dilakukan. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah lebih lagi penularan kasus covid 19 di masyarakat.

C. Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen)

Kondisi kekurangan gizi (underweight) pada balita ditandai dengan berat badan yang berada pada posisi batas garis merah pada kartu status kesehatan balita. Kondisi ini akan terus menurun yang pada akhirnya dapat menyebabkan status gizi kurang kalau tidak segera ditangani. Di Kota Bandar Lampung pada tahun 2020 sebanyak 593 anak balita mengalami kondisi kekurangan gizi (underweight) atau sebesar 5,77 persen. Pada tahun 2021 kondisi kekurangan gizi (underweight) pada balita menurun menjadi 4.09%, jumlah ini didapatkan dari hasil operasi timbang yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung. Banyak sebab yang mengakibatkan terjadinya gizi kurang ini, salah satunya adalah pemantauan kesehatan yang belum maksimal. Masih adanya masyarakat

yang belum melaksanakan pemeriksaan rutin bagi balitanya ke sarana pelayanan kesehatan.

D. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (bawah dua tahun) (persen)

Stunting merupakan kondisi dimana tubuh anak pendek atau sangat pendek. Banyak penyebab stunting ini, salah satunya adalah kondisi anak khususnya anak yang berumur di bawah dua tahun (baduta) kurang gizi saat dalam kandungan ibunya. Berdasarkan data diperoleh hasil jumlah kasus stunting anak yang berumur di bawah dua tahun di Kota Bandar Lampung sebesar 6,6 persen (hasil penimbangan) atau sebanyak 924 bayi umur dibawah dua tahun. Meski angka ini masih di bawah target yang ditetapkan yaitu sebesar 20 persen namun perlu mendapat perhatian dari Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung. Pada tahun 2021 kasus stunting menjadi 6.65 persen (hasil penimbangan). Telah dilakukan berbagai upaya yang diselaraskan dengan target standar pelayanan minimal bidang kesehatan dalam upaya menurunkan kasus stunting ini di Kota Bandar Lampung. Seperti kegiatan sebelumnya yang telah dilakukan berkaitan dengan indikator sasaran menurunkan angka kematian ibu dan balita serta perbaikan gizi masyarakat. Upaya meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan balita dan perbaikan bagi anak gizi kurang sehingga kasus stunting ini lambat laun dapat terus dikurangi.

II. Sasaran II: Peningkatan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular, dengan indikator sasaran :

A. Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk

Penyakit TB Paru merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi bakteri *Mycobacterium tuberculosis*. Penyakit ini dapat menyebar melalui droplet orang yang telah terinfeksi basil TB. Kondisi Tahun 2020 sasaran TB semua

tipe/CNR sebesar 2.500 dengan capaian sebanyak 3.300 kasus atau 211 per 100.000 penduduk. Angka ini lebih rendah dari Tahun 2019 dengan sasaran TB semua tipe/CNR sebesar 2.500 dengan capaian sebanyak 3.300 kasus atau 330 per 100.000 penduduk. Pada tahun 2021 kasus kembali menurun menjadi 207 per 100.000 penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa kecenderungan kasus tuberculosis di Kota Bandar Lampung menurun. Peran petugas dan kader kesehatan dalam upaya penemuan kasus tuberculosis perlu terus ditingkatkan dalam upaya penemuan kasus baru tuberculosis ini sehingga secara dini dapat diobati dan disembuhkan dan tidak menularkan kepada orang lain disekitarnya. Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung juga telah bekerja sama dengan lembaga CSR Aisyiah dalam upaya penemuan kasus baru tuberculosis di wilayah Kota Bandar Lampung. Selain itu upaya promosi dan penyuluhan kepada masyarakat baik secara langsung oleh petugas kesehatan maupun melalui media cetak dan media elektronik bagaimana bahayanya penyakit tuberculosis ini serta bagaimana pencegahan dan penaggulangannya. Perlunya disampaikan ke masyarakat bahwa penyakit tuberculosis ini merupakan penyakit menular namun dapat disembuhkan bila pengobatannya dilakukan secara teratur sesuai dengan petunjuk dari petugas kesehatan.

B. Persentase orang dengan HIV

Kejadian Kasus penderita HIV diibaratkan seperti fenomena gunung es dimana tidak semua tampak dipermukaan dan terlihat jumlah kasus HIV ini, tidak terkecuali di wilayah Kota Bandar Lampung. Berbagai macam upaya telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung untuk penjangkauan kasus penderita HIV ini. Kerjasama

baik dengan lintas sector terkait seperti Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), Lembaga Masyarakat dan lembaga masyarakat lainnya sebagai penggerak pencegahan dan penanggulangan kasus HIV. Penjangkauan terus dilakukan untuk menjaring kasus-kasus baru HIV yang terdapat di kelompok resiko (seperti ibu hamil, pengguna narkoba jarum suntik), dan kelompok populasi kunci seperti Waria, warga binaan di lembaga pemasyarakatan. Data menunjukkan jumlah kasus HIV di tahun 2020 sebanyak 234 orang (0,021%) dari jumlah penduduk Kota Bandar Lampung 1.068.985. Data ini lebih rendah dibandingkan tahun 2019 dengan kasus HIV sebanyak 257 orang dan angka ini masih berada di bawah target 0,227 persen. Pada tahun 2021 kembali menurun kasus HIV menjadi 213 kasus. Berikut pada tabel 3.2 dapat dilihat jumlah kasus HIV di Kota Bandar Lampung dari tahun 2015-2021

Tabel 3.2 Jumlah Kasus HIV di Kota Bandar Lampung Periode 2016-2021

No	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2016	267
2.	2017	280
3.	2018	340
4.	2019	283
5.	2020	257
6	2021	213

C. Persentase peningkatan penemuan penyakit tidak menular (diabetes melitus)

Pada saat ini penyakit degeneratif dan penyakit yang dipengaruhi oleh gaya hidup semakin meningkat. Semakin banyaknya ragam makanan dan gaya hidup masyarakat yang kurang dalam melakukan aktifitas fisik/olah raga memperburuk kondisi penyakit tidak menular (diabetes mellitus). Berdasarkan cakupan pada program Penyakit Tidak

Menular (PTM) di Kota Bandar Lampung Tahun 2020 jumlah penemuan kasus diabetes mellitus sebesar 27.451 kasus (98,79%) dari jumlah sasaran sebanyak 27.788 orang. Tahun 2021 jumlah kasus diabetes mellitus 56 persen dari target yang ditetapkan sebesar 60 persen atau sebanyak 70.647 kasus.

D. Prevalensi tekanan darah tinggi (persen)

Sama halnya dengan penyakit diabetes mellitus, penyakit tekanan darah tinggi merupakan bagian dari penyakit tidak menular yang saat inipun jumlah kasusnya mulai meningkat di Kota Bandar Lampung. Data menunjukkan angka kasus/prevalensi penyakit tekanan darah tinggi tahun 2020 jumlah kasus/prevalensi penyakit tekanan darah tinggi 63.432 (47,81%) dari total sasaran 132.667 orang. Tahun 2021 jumlah kasus/prevalensi penyakit tekanan darah tinggi 84.895 dari total sasaran 196.149. (43,28%). Penurunan kasus penyakit ini dikarenakan penjarangan/pemeriksaan dilakukan hanya pada orang yang melakukan pemeriksaan/berobat ke Puskesmas. Kegiatan penjarangan yang selama ini aktif dilakukan melalui kegiatan Pos Pelayanan Terpadu (Posbindu), Posyandu Usila tidak dilakukan karena kondisi pandemic Covid 19 yang mengharuskan kegiatan tatap muka dibatasi. Selain itu kegiatan promotif melalui berbagai media, supaya masyarakat dapat melakukan GERMAS (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) terus dilaksanakan secara *mobile* apalagi dalam kondisi pandemi covid 19 ini. Protokol kesehatan untuk penjangkauan penularan covid 19 harus secara terus menerus dilakukan.

Sasaran III: Peningkatan Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan, dengan indikator sasaran :

A. Persentase Puskesmas yang terakreditasi

Akreditasi adalah salah satu bentuk pengakuan dari Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan RI terhadap kualitas pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama/FKTP (Puskesmas). Pelaksanaan akreditasi di Puskesmas ini akan dievaluasi setiap 3 (tiga) tahun sekali untuk tetap menjaga kualitas pelayanannya. Sejak tahun 2016 Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung secara bertahap telah melaksanakan proses akreditasi terhadap Puskesmas. Sampai dengan tahun 2020 ini telah seluruh Puskesmas di Kota Bandar Lampung (30 Puskesmas) terakreditasi, sehingga kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan. Secara lengkap klasifikasi akreditasi dari Puskesmas di Kota Bandar Lampung adalah :

1. Paripurna : 4 Puskesmas
2. Utama : 11 Puskesmas
3. Madya : 14 Puskesmas
4. Dasar : 1 Puskesmas

Pada tahun 2021 ini juga seharusnya dilakukan proses re akreditasi untuk 6 Puskesmas yang pada tahun 2017 telah dilakukan akreditasi namun dikarenakan adanya pandemi covid 19 kegiatan re akreditasi Puskesmas ini tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian proses pembinaan dan monitoring dari Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung terhadap kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas terus dilakukan dengan menggunakan sumber anggaran yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kesehatan tahun 2021.

B. Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan gratis

Pemerintah Kota Bandar Lampung sejak tahun 2011 telah melaksanakan program pengobatan gratis bagi masyarakat Kota Bandar Lampung yang belum ter memiliki asuransi kesehatan. Pelaksanaan program ini bersumber dana APBD Kota Bandar Lampung. Pada mulanya program ini hanya diperuntukan bagi masyarakat miskin di Kota Bandar Lampung, dengan program ini masyarakat miskin Kota Bandar Lampung yang belum ter cover oleh asuransi kesehatan dapat menggunakan fasilitas berobat gratis ini di Puskesmas maupun rumah sakit baik pemerintah maupun swasta yang telah bekerjasama dengan Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan fasilitas rawat inap kelas 3. (13 rumah sakit dan 30 Puskesmas). Pada saat ini program pengobatan gratis ini tidak hanya diperuntukan bagi masyarakat miskin Kota Bandar Lampung, tapi bagi seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung yang belum tercover oleh asuransi kesehatan, sehingga 100% masyarakat Kota Bandar Lampung yang belum mempunyai asuransi kesehatan dan menggunakan fasilitas berobat gratis ini.

Sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 jumlah masyarakat yang menggunakan fasilitas pengobatan gratis di Puskesmas maupun rumah sakit cenderung mengalami penurunan. Untuk tahun 2021 jumlah masyarakat yang menggunakan fasilitas berobat gratis di rumah sakit baik pemerintah maupun rumah sakit swasta meningkat, hal ini dimungkinkan banyaknya masyarakat kota Bandar Lampung yang memerlukan pelayanan kesehatan tingkat lanjut di rumah sakit. Berikut data jumlah pasien yang

menggunakan fasilitas pengobatan gratis dapat dilihat pada tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2 Data Kunjungan Pasien Pengobatan Gratis Kota Bandar Lampung Tahun 2015-2021

No	Sarana	Kunjungan Pasien (Tahun)							Keterangan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Rumah Sakit	41.852	34.425	25.585	18.219	18.166	10.991	19.882	Data diperoleh sampai Bulan November
2.	Puskesmas	341.479	363.169	281.866	242.184	140.941	186.505	158.755	
	Jumlah	383.331	397.594	307.451	260.403	159.107	197.496	178.637	

Selain rencana kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2021, Dinas Kesehatan juga mempunyai target kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan. SPM berfungsi sebagai instrumen untuk memperkuat pelaksanaan *Performance Based Budgeting*. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga mengamanatkan pada Pemerintah Daerah untuk benar-benar memprioritaskan belanja daerah untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM yang berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Berikut disampaikan tabel capaian SPM Dinas Kesehatan tahun 2021

CAPAIAN SPM TAHUN 2021
DINAS KESEHATAN KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Sasaran Dalam Tahun	Target Dalam Tahun (%)	Realisasi	Capaian
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar (K4)	19.447	100	18.844	96,90
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan (PN)	18.563	100	18.055	97,26
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir usia 0 - 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar (KN Lengkap)	17.679	100	17.551	99,28

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Sasaran Dalam Tahun	Target Dalam Tahun (%)	Realisasi	Capaian
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar + Jumlah Balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar + Balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	86.268	100	35.974	41,70
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	154.145	100	9.975	6,47
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah orang usia 15-59 tahun di kab/kota yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	743.139	100	559.870	75,34
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali	88.000	100	78,495	89,20
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah penderita hipertensi usia >= 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	196.149	100	84.895	43,28
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus	Jumlah penderita diabetes mellitus usia >= 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	70.647	100	35.338	50,02
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	1.851	100	1.732	93,57
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis	Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang	21.426	100	17.193	80,24
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human immunodeficiency Virus)	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	28.981	100	13.198	46,00

2. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam Tahun 2021 Realisasi Anggaran yang dipergunakan untuk mencapai sasaran strategis yang dikehendaki dalam

rencana strategis sebagai capaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4 Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Tahun 2021

NO	NAMA KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	VOLUME	REALISASI		
				KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5	6	7
	BELANJA DAERAH	333.105.681.174,00		225.187.204.424,45	67,60%	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100.307.544.493,00		94.811.699.043,00	94,52%	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.000.000,00		24.268.400,00	60,67%	
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.000.000,00	1 paket	24.268.400,00	60,67%	100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	79.736.014.581,00		76.588.161.346,00	96,05%	
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	79.520.014.581,00	14 bulan	76.383.396.346,00	96,06%	100
2.1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	216.000.000,00	12 bulan	204.765.000,00	94,80%	80
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.000.000,00		-	0,00%	-
3.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas	25.000.000,00	1 paket	-	0,00%	-
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	242.600.000,00		176.177.881,00	72,62%	70
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	20.000.000,00	1 paket	14.970.000,00	74,85%	90
4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	75.000.000,00	1 paket	56.518.700,00	75,36%	100
4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000,00	1 paket	9.987.000,00	99,87%	100
4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	41.250.000,00	1 paket	40.150.000,00	97,33%	100
4.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.000.000,00	1 paket	33.732.000,00	67,46%	100
4.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.500.000,00	1 paket	7.500.000,00	100,00%	100
4.7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.750.000,00	1 paket	4.410.000,00	50,40%	100
4.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.100.000,00	1 paket	8.910.181,00	29,60%	35
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	145.320.000,00		-	0,00%	-
5.1	Pengadaan Mebel	145.320.000,00	1 paket	-	0,00%	-
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	19.354.750.000,00		17.575.418.166,00	90,81%	
6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	180.000.000,00	12 bulan	143.818.166,00	79,90%	100
6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	19.174.750.000,00	12 bulan	17.431.600.000,00	90,91%	95

NO	NAMA KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	VOLUME	REALISASI		
				KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5	6	7
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	763.859.912,00		447.673.250,00	58,61%	
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.990.002,00	1 paket	28.379.550,00	66,01%	70
7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	515.869.910,00	1 paket	388.052.700,00	75,22%	80
7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	1 paket	6.485.000,00	64,85%	80
7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	195.000.000,00	1 paket	24.756.000,00	12,70%	25
II	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	231.368.527.881,00		152.893.353.042,02	66,08%	
8	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	45.568.312.368,00		33.350.403.782,00	73,19%	
8.1	Pembangunan Puskesmas	8.220.250.000,00	3 pusk	5.639.948.735,00	68,61%	100
8.2	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan	2.768.127.295,00	1 paket	198.000.000,00	7,15%	20
8.3	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	14.220.768.516,00	1 paket	9.570.631.824,00	67,30%	100
8.4	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	246.669.850,00	1 paket	171.669.850,00	69,59%	100
8.5	Pengadaan Obat, Vaksin	14.333.157.375,00	1 paket	11.991.476.822,00	83,66%	100
8.6	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.779.339.332,00	1 paket	5.778.676.551,00	99,99%	100
9	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	185.605.215.513,00		119.537.949.260,02	64,40%	
9.1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	63.000.000,00	1 paket	61.740.000,00	98,00%	100
9.2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	42.250.000,00	1 paket	36.028.000,00	85,27%	100
9.3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	130.120.000,00	1 paket	78.860.000,00	60,61%	100
9.4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	40.000.000,00	1 paket	-	0,00%	-
9.5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	29.100.000,00	1 paket	-	0,00%	-
9.6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	22.865.000,00	1 paket	13.500.000,00	59,04%	100
9.7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita	18.700.000,00	1 paket	-	0,00%	-

NO	NAMA KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	VOLUME	REALISASI		
				KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5	6	7
	Diabetes					
9.8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	215.270.377,00	1 paket	-	0,00%	-
9.9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	40.000.000,00	1 paket	-	0,00%	-
9.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	39.400.000,00	1 paket	-	0,00%	-
9.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)	667.000.000,00	1 paket	-	0,00%	100
9.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	7.942.975.000,00	1 paket	4.458.257.600,00	56,13%	70
9.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	809.195.000,00	1 paket	182.661.000,00	22,57%	100
9.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	46.200.000,00	1 paket	-	0,00%	-
9.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	170.379.500,00	1 paket	-	0,00%	70
9.16	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	310.018.500,00	1 paket	161.118.500,00	51,97%	100
9.17	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	84.110.000,00	1 paket	33.655.500,00	40,01%	60
9.18	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	60.010.000,00	1 paket	14.611.800,00	24,35%	50
9.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	20.000.000,00	1 paket	-	0,00%	-
9.20	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	204.688.250,00	1 paket	95.938.250,00	46,87%	50
9.21	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	65.217.075.758,00	1 paket	23.810.048.759,00	36,51%	50
9.22	Operasional Pelayanan Puskesmas	93.708.113.500,00	1 paket	82.922.307.201,02	88,49%	100
9.23	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	13.902.420.228,00	1 paket	7.465.727.850,00	53,70%	60
9.24	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di kabupaten/kota	1.782.324.400,00	1 paket	163.576.400,00	9,18%	20
9.25	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	40.000.000,00	1 paket	39.918.400,00	99,80%	100
10	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan	195.000.000,00		5.000.000,00	2,56%	
10.1	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	195.000.000,00	1 paket	5.000.000,00	2,56%	10
III	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	621.250.000,00		439.222.858,00	70,70%	

NO	NAMA KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	VOLUME	REALISASI		
				KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5	6	7
11	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya	425.000.000,00	1 paket	408.392.858,00	96,09%	
1.1	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia kesehatan sesuai standar	400.000.000,00	1 paket	399.642.858,00	99,91%	100
1.2	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	25.000.000,00	1 paket	8.750.000,00	35,00%	50
12	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi	196.250.000,00		30.830.000,00	15,71%	-
2.1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	196.250.000,00	1 paket	30.830.000,00	15,71%	100
IV	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	408.358.800,00		231.562.800,00	56,71%	
13	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan	159.185.000,00		94.110.000,00	59,12%	-
1.1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	159.185.000,00	1 paket	94.110.000,00	59,12%	100
14	Penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	173.093.800,00		137.452.800,00	79,41%	
2.1	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT Sebagai Izin Produksi Sertifikat Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh IRT	173.093.800,00	1 paket	137.452.800,00	79,41%	100
15	Pemeriksaan dan Tindaak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan produk makanan minuman Industri Rumah Tangga	76.080.000,00		-	0,00%	-
3.1	Pemeriksaan post market pada produk makanan Minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	76.080.000,00	1 paket	-	0,00%	100
V	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	400.000.000,00		46.147.500,00	11,54%	

NO	NAMA KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	VOLUME	REALISASI		
				KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5	6	7
16	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	55.860.000,00		12.681.900,00	22,70%	-
1.1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	55.860.000,00	1 paket	12.681.900,00	22,70%	35
17	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	327.340.000,00		33.465.600,00	10,22%	-
2.1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup bersih dan sehat	327.340.000,00	1 paket	33.465.600,00	10,22%	80
18	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	16.800.000,00		-	0,00%	-
3.1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	16.800.000,00	1 paket	-	0,00%	100
	JUMLAH	333.105.681.174,00		248.421.985.243,02	74,58%	80

Berdasarkan tabel 3.4 realisasi anggaran Dinas kesehatan Tahun 2021, meskipun dalam kondisi pandemi covid- 19 yang membatasi aktifitas secara tatap muka/pertemuan langsung, pelayanan kesehatan masih dapat mencapai hasil meskipun belum maksimal.

Dapat dijelaskan bahwa Anggaran yang mendukung Program kegiatan kesehatan di Kota Bandar Lampung Tahun 2021 berdasarkan Indikator Sasaran dan Target dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 333.105.681.174 dengan realisasi sebesar Rp. 248.421.985.243,02 (74,58%). Anggaran tersebut diperuntukan bagi 5 Program dan 18 kegiatan dan 59 Sub Kegiatan bidang kesehatan. Program Penunjang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 7 Kegiatan dan 19 sub kegiatan merupakan program pendukung bagi

terselenggaranya tupoksi Dinas Kesehatan yang bersifat rutin dilaksanakan. Untuk itu yang akan dikupas lebih mendalam adalah pelaksanaan 4 (empat) program lainnya.

3.2.1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ini terdiri dari 3 kegiatan dan 32 sub kegiatan. Total anggaran program ini sebesar Rp. 231.368.527.881,00. Output kinerja dari program adalah angka kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup sebesar 10 kasus, prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (bawah dua tahun) sebesar 6,6 persen, tingkat prevalensi tuberkulosis per 100.000 penduduk sebanyak 364 kasus dan cakupan pelayanan BLUD 100 persen. Realisasi anggaran sebesar Rp. 152.893.353.042,02,00 (66,08%). Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

1.1. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 45.568.312.368,00 dan realisasi anggaran Rp. 33.350.403.782,00 (73,19%). Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan pendukungnya yaitu :

1.1.1. Pembangunan Puskesmas

Sub kegiatan ini dilaksanakan untuk renovasi 3 (tiga) bangunan Puskesmas yang kondisinya saat ini rusak, dan untuk memenuhi persyaratan bangunan fasilitas kesehatan yang sesuai standar Kementerian Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas. Bangunan Puskesmas tersebut adalah. Puskesmas Way Halim, Puskesmas Susunan Baru dan Puskesmas Way Laga yang ditingkatkan statusnya dari Puskesmas Non Rawat Inap menjadi

Puskesmas Rawat Inap. Alokasi anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 8.220.250.000,00 bersumber dari DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang kesehatan tahun 2021. Alokasi anggaran ini terdiri dari untuk pembayaran hutang DAK fisik bangunan Puskesmas Kampung Sawah Tahun 2020 Rp.1.563.249.000 (realisasi 100%) dan untuk renovasi 3 (tiga) bangunan Puskesmas di Tahun 2021 sebesar Rp. Rp. 6.657.001.000 dan telah terealisasi Rp. 4.076.699.735 (61,23%). Saat ini renovasi 3 Puskesmas tersebut telah selesai 100 persen dilaksanakan.

1.1.2. Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan

Sub kegiatan ini dilaksanakan untuk pengadaan generator set (genset) yang diperuntukkan bagi Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung. Pengadaan genset ini dimaksudkan untuk suplai listrik bagi penyimpanan vaksin dan obat lainnya apabila sumber listrik PLN padam, sehingga kualitas vaksin dan obat lainnya dapat terjaga kualitasnya. Alokasi anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 2.768.127.295 bersumber dari anggaran Dana Insentif Daerah (DID) tahun anggaran 2021. Realisasi anggaran Rp. 198.000.000,00 (7,15%). Rendahnya realisasi anggaran dikarenakan waktu yang dibutuhkan untuk proses lelang yang singkat karena anggaran ini diperoleh pada saat Perubahan APBD (bulan Oktober 2021). Pembelian genset dilakukan dengan proses pengadaan langsung dengan nilai dibawah

Rp. 200.000.000,00. Dengan menggunakan aplikasi SIKAP (sistem informasi Kinerja Penyedia) dari LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).

1.1.3. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Alokasi anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 14.220.768.516,00 dengan output kinerja tersedianya peralatan kesehatan di Puskesmas untuk melengkapi kebutuhan peralatan kesehatan sesuai standar. Rincian dari penggunaan anggaran tersebut sebagai berikut :

- Pembayaran hutang DAK pembelian alat kesehatan tahun 2020 sebesar Rp. Rp. 3.867.639.916 (realisasi 100%)
- Pengadaan peralatan kesehatan tahun 2021 sumber DAK Fisik tahun 2021 sebesar Rp. 5.436.383.000 (realisasi 3.716.425.908 atau sebesar 68 persen)
- Pengadaan alat kesehatan dalam penanggulangan covid-19 sumber anggaran Dana Insentif Daerah (DID) tahun 2021 sebesar Rp. 4.916.745.600 (realisasi 801.440.000 atau 16 persen).

1.1.4. Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi

Dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 246.669.850,00 sumber anggaran DAK bidang kesehatan. Output kinerja yang diharapkan adalah terlaksananya tera ulang/kalibrasi peralatan kesehatan di Puskesmas. kalibrasi dilakukan agar kualitas peralatan kesehatan di Puskesmas tetap

terjaga kualitasnya dan akurat untuk digunakan. Alokasi anggaran dipergunakan sebagai berikut :

- Pembayaran hutang kalibrasi peralatan kesehatan di Puskesmas tahun 2020 Rp. 171.669.850 (realisasi 100%)
- Pelaksanaan kalibrasi di tahun 2021 Rp. 75.000.000,00 Pelaksanaan kegiatan 100% telah selesai dilaksanakan namun realisasi anggaran nol karena pembayaran akan dilakukan pada tahun 2022.

1.1.5. Pengadaan obat,vaksin

Dukungan anggaran sebesar Rp. 14.333.157.375,00 sumber anggaran DAK bidang kesehatan. Output kinerja yang diharapkan adalah tersedianya kebutuhan obat pelayanan dasar di 31 Puskesmas dan 50 Puskesmas Pembantu di Kota Bandar Lampung. Alokasi anggaran dipergunakan untuk :

- Pembayaran hutang pengadaan obat DAK tahun 2020 sebesar Rp. 7.102.180.462 (realisasi 100%)
- Pengadaan obat DAK tahun 2021 Rp. 4.105.849.808 (realisasi 3.286.986.934 atau sebesar 80 persen).
- Pengadaan obat dalam upaya penanggulangan covid 19 sumber anggaran Dana Insentif Daerah (DID) tahun 2021 Rp. 3.125.127.105 (realisasi Rp. 1.602.309.426 atau sebesar 51 persen).

1.1.6. Pengadaan Bahan Habis Pakai

Dukungan anggaran sebesar Rp. 5.779.339.332,00 sumber anggaran DAK bidang kesehatan. Output kinerja yang diharapkan adalah tersedianya

kebutuhan bahan habis pakai di 31 Puskesmas dan 50 Puskesmas Pembantu di Kota Bandar Lampung.

Alokasi anggaran dipergunakan untuk :

- Pembayaran hutang pengadaan bahan medis habis pakai (BMHP) DAK tahun 2020 sebesar Rp. 7.102.180.462 (realisasi 100%) Rp. 3.753.340.140 (realisasi 100%)
- Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) DAK tahun 2021 Rp. 2.025.999.192 (realisasi anggaran sebesar Rp. 2.025.336.411 atau sebesar 99,97 persen).

1.2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP

Kegiatan Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP dengan dukungan anggaran sebesar Rp.185.605.215.513,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 119.537.949.260,02 (64,40%).. Kegiatan ini terdiri dari 25 sub kegiatan pendukungnya yaitu :

1.2.1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Dukungan anggaran sebesar Rp. 63.000.000,00 sumber anggaran DAK bidang kesehatan. Output kinerja yang ingin dicapai adalah cakupan pemeriksaan ibu hamil, terlaksananya pertemuan peningkatan tablet FE pada ibu Hamil, tersedianya media penyuluhan untuk Ibu Hamil. Realisasi anggaran dari sub kegiatan ini sebesar Rp. 61.740.000,000 (98%) dengan realisasi pekerjaan 100 persen terlaksana.

1.2.2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
Dukungan anggaran sebesar Rp. 42.250.000,00

sumber anggaran DAK bidang kesehatan. Output kinerja yang ingin dicapai adalah menurunnya kasus kematian ibu bersalin. Realisasi anggaran dari sub kegiatan ini sebesar Rp. 36.028.000,00 (85,27%) dengan realisasi dengan realisasi pekerjaan 100 persen terlaksana. Jumlah Kematian ibu bersalin di tahun 2021 berjumlah 15 orang , jumlah ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 10 orang, hal ini dikarenakan adanya komplikasi ibu bersalin dengan kasus covid-19.

1.2.3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Dukungan anggaran sebesar Rp. 130.120.000,00 sumber anggaran DAK bidang kesehatan. Output kinerja yang ingin dicapai adalah menurunnya kasus kematian bayi dan balita. Realisasi anggaran dari sub kegiatan ini sebesar Rp. 78.860.000,00 (60,61%) dengan realisasi pekerjaan 100 persen terlaksana. Jumlah kematian bayi dan balita di Kota Bandar Lampung tahun 2021 berjumlah 60 orang, jumlah ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 34 orang, hal ini dikarenakan kematian bayi dan balita dengan kasus covid-19.

1.2.4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Dukungan anggaran sebesar Rp. 40.000.000,00 sumber anggaran DAK bidang kesehatan. Output kinerja yang ingin dicapai adalah penjarangan siswa Sekolah Dasar untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan. Pada tahun 2021 dengan kondisi pandemi covid-19 yang masih terjadi maka kegiatan penjarangan kesehatan anak Sekolah Dasar ini tidak dapat dilakukan. Pembatasan kegiatan

tatap muka yang dapat menyebabkan kerumunan orang yang akan memicu penularan covid-19 pada anak sekolah ditiadakan. Alokasi anggaran pada sub kegiatan ini tidak direalisasikan.

1.2.5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Dukungan anggaran sebesar Rp. 29.100.000,00 sumber anggaran DAK bidang kesehatan. Output kinerja yang ingin dicapai adalah pemeriksaan kesehatan pada usia produktif (15-59 tahun) melalui Posbindu (Pos Pembinaan Terpadu) untuk deteksi dini penyakit tidak menular baik berasal dari keturunan maupun perubahan pola hidup, seperti penyakit darah tinggi, penyakit kencing manis/diabetes melitus, hipertensi dan penyakit lainnya. Kegiatan yang dalam kondisi normal dilakukan secara aktif dengan mendatangi tempat-tempat keramaian, tempat berkumpul orang guna mendapatkan jumlah pemeriksaan yang maksimal. Pada masa pandemi covid-19 kegiatan ini tidak dapat dilakukan sehingga anggaran pada kegiatan ini tidak direalisasikan. Kegiatan dilakukan secara pasif dengan menunggu masyarakat yang akan memeriksakan kesehatannya di pelayanan kesehatan, baik itu Puskesmas, maupun Puskesmas Pembantu.

1.2.6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Dukungan anggaran sebesar Rp. 22.865.000,00 sumber anggaran DAK bidang kesehatan. Output kinerja yang ingin dicapai adalah pelaksanaan evaluasi dan monitoring serta kesehatan pada usia produktif (15-59 tahun)

melalui Posbindu (Pos Pembinaan Terpadu) untuk deteksi dini penyakit hipertensi/tekanan darah tinggi. Realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 13.500.000,00 (59,04%) berupa pertemuan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam upaya pencegahan dan peanggulangan penyakit hipertensi.

1.2.7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes

Dukungan anggaran sebesar Rp. 18.700.000,00 sumber anggaran DAK bidang kesehatan. Output kinerja yang ingin dicapai adalah pemeriksaan kesehatan dalam upaya deteksi dini penyakit diabetes melitus di masyarakat. Kegiatan yang dalam kondisi normal dilakukan secara aktif dengan mendatangi tempat-tempat keramaian, tempat berkumpul orang guna mendapatkan jumlah pemeriksaan yang maksimal. Pada masa pandemi covid-19 kegiatan ini tidak dapat dilakukan sehingga anggaran pada kegiatan ini tidak direalisasikan. Kegiatan dilakukan secara pasif dengan menunggu masyarakat yang akan memeriksakan kesehatannya di pelayanan kesehatan, baik itu Puskesmas, maupun Puskesmas Pembantu.

1.2.8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat

Dukungan anggaran sebesar Rp. 215.270.377,00 sumber anggaran berasal dari Dana Bagi hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang terdiri :

- Alokasi anggaran tahun 2021 sebesar Rp. 35.000.000,00 yang diperuntukan bagi

pelaksanaan pertemuan monitoring dan evaluasi kegiatan penyakit menular dan tidak menular, kegiatan pertemuan ini tidak dapat dilaksanakan karena kondisi pandemi covid-19. Pelaksanaan pertemuan dengan mengundang banyak orang dikhawatirkan akan menimbulkan penularan covid-19. Pelaksanaan evaluasi dan monitoring dilaksanakan secara daring/virtual.

- Alokasi anggaran berupa silpa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2020. Dana silpa ini akan dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan di tahun 2022.

1.2.9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Dukungan anggaran sebesar Rp. 40.000.000,00 sumber anggaran DAK bidang kesehatan. Output kinerja yang ingin dicapai adalah pelaksanaan pertemuan monitoring dan evaluasi kegiatan penyakit tuberkulosis. Pelaksanaan sosialisasi sistem informasi terpadu tuberkulosis (SITB). Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Kegiatan pertemuan ini tidak dapat dilaksanakan karena kondisi pandemi covid-19. Pelaksanaan pertemuan dengan mengundang banyak orang dikhawatirkan akan menimbulkan penularan covid-19. Pelaksanaan evaluasi dan monitoring dilaksanakan secara daring/virtual, sehingga tidak ada realisasi anggaran pada sub kegiatan ini.

1.2.10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV Dukungan anggaran sebesar Rp. 39.400.000,00 sumber anggaran DAK bidang

kesehatan. Output kinerja yang ingin dicapai adalah pelaksanaan sosialisasi HIV ke masyarakat resiko tertular HIV (populasi kunci), monitoring dan evaluasi terpadu program penyakit menular ke Puskesmas, bimtek layanan HIV ke lapas dan rutan. Tidak ada realisasi anggaran pada sub kegiatan ini dikarenakan kegiatan pertemuan tatap muka pada masa pandemi covid-19 belum bisa dilaksanakan untuk menghindari terjadinya penularan.

1.2.11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)

Dukungan anggaran sebesar Rp. 667.000.000,00 sumber anggaran DAK bidang kesehatan. Output kinerja yang ingin dicapai dari sub kegiatan ini adalah penanggulangan covid 19 berupa tracing, testing dan treatment (3T). Pada tahun 2021 kegiatan penanggulangan covid ini juga didukung oleh anggaran bersumber Dana Alokasi Umum (DAU) berupa pemberian insentif bagi tenaga kesehatan dalam penanggulangan covid-19. Untuk dukungan kegiatan vaksinasi, distribusi vaksin dan monitoring kegiatan vaksinasi juga telah didukung oleh anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), sehingga pemanfaatan anggaran pada sub kegiatan ini tidak digunakan (tidak ada realisasi anggaran).

1.2.12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana

Dukungan anggaran sebesar Rp. 7.942.975.000,00. Penggunaan anggaran dari sub kegiatan diperuntukkan :

- Pembayaran insentif vaksinator vaksin covid-19 sebesar anggaran. Rp. 5.000.000.000,00 dengan realisasi pembayaran sampai dengan bulan Agustus 2021 sebesar Rp. 1.982.800.000,00 (39,65%). Pembayaran insentif vaksinator vaksin covid-19 tahun 2021 dibayarkan sampai dengan Bulan Agustus).
- Operasional pelayanan ambulan gratis Rp. 638.000.000 sumber dana APBD Pemerintah Kota Bandar Lampung tahun 2021. Output kinerja dari kegiatan ini adalah terlaksananya pelayanan ambulan gratis yang diperuntukkan bagi masyarakat Kota Bandar Lampung yang memerlukan pelayanan kegawatdaruratan. Masyarakat Kota Bandar Lampung dapat menggunakan fasilitas pelayanan ambulan gratis ini melalui call center nomor 0822 78221 400 yang siap melayani masyarakat 24 jam, kapan saja dibutuhkan. Realisasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. Rp. 533.957,600,00 (83,69%). Pada tahun 2021 jumlah masyarakat Kota Bandar Lampung yang telah memanfaatkan ambulan gratis ini sebanyak 5.760 orang, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pasien sakit: 3.667
2. Jenazah : 1.998
3. Melahirkan : 34
4. Lakalantas : 61

- Dukungan pelaksanaan vaksinasi yang diperuntukkan bagi distribusi, penyimpanan vaksin, monitoring dan evaluasi pelaksanaan vaksin, dukungan operasional tim pemantau Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) sebesar Rp. 301.150.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 205.000.000,00 (68,07%).
- Pengadaan coldchain/tempat penyimpanan vaksin pada Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan dan Puskesmas sebesar Rp. 1.800.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.592.500.000 (88,47%)
- Pembayaran hutang kegiatan tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 144.000.000,00.

1.2.13. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

Dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.809.195.000,00 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus/DAK bidang kesehatan tahun 2021. Penggunaan anggaran dari sub kegiatan ini diperuntukkan beberapa pertemuan dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat dan upaya penanggulangan stunting mulai dari penyusunan regulasi, pemantapan kompetensi petugas dalam pelayanan gizi dan penanggulangan stunting serta monitoring dan evaluasi kegiatan. Realisasi anggaran sebesar Rp. 167.111.000,00 (20,65%) dengan output kegiatan 100 persen. Masih adanya pelaksanaan kegiatan yang pembayarannya dilakukan pada tahun anggaran 2022.

1.2.14. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah raga Dukungan anggaran untuk pelaksanaan

kegiatan ini sebesar Rp.46.200.000,00 yang bersumber dari Dana Insentif Daerah (DID) tahun anggaran 2021. Alokasi anggaran diperuntukkan bagi pelaksanaan beberapa pertemuan monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan kesehatan kerja dan olah raga. Anggaran untuk kegiatan ini dialokasikan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021 pada bulan Oktober 2021 sehingga kebutuhan waktu untuk pelaksanaan kegiatan tidak mencukupi. Alokasi anggaran tidak dapat direalisasikan.

1.2.15. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

Dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.170.379.500,00. Alokasi anggaran ini diperuntukkan bagi kegiatan :

- Pemeriksaan kualitas air minum PDAM yang besaran anggarannya Rp. 76.200.000,00 berasal dari Dana Insentif Daerah (DID). Output kegiatan telah dilaksanakan pemeriksaan sampel sebanyak 100 sampel. Pemeriksaan air minum dilakukan dengan bekerjasama pihak Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Lampung.
- Alokasi anggaran dipergunakan untuk pelaksanaan pertemuan koordinasi baik lintas program maupun lintas sektor dalam upaya pencapaian kegiatan penyehatan lingkungan di Kota Bandar Lampung. Alokasi anggaran yang disediakan berjumlah Rp. 94.179.500,00. Kegiatan tidak dilaksanakan karena adanya pembatasan kegiatan pertemuan yang

melibatkan banyak orang yang akan menimbulkan penyebaran covid-19.

1.2.16. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan

Dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 310.018.500,00. Alokasi anggaran ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kesehatan tahun anggaran 2021. Alokasi anggaran dipergunakan untuk pertemuan koordinasi lintas program dan sektor dalam upaya pelayanan promosi kesehatan ke masyarakat. Realisasi anggaran sebesar Rp. 161.118.500,00 (51,97%) yang terdiri dari untuk pembayaran hutang kegiatan tahun 2021 sebesar Rp. 150.018.500,00 (realisasi 100%). Realisasi anggaran untuk kegiatan tahun 2021 sebesar Rp. 11.100.000,00.

1.2.17. Pengelolaan Surveilans Kesehatan

Dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 84.110.000,00. Alokasi anggaran ini bersumber dari :

- Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kesehatan tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 34.110.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 33.655.500,00 (98,67%). Ouput kegiatan berupa monitoring dan evaluasi kegiatan penanggulangan penyakit.
- Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp. 50.000.000,00 yang dipergunakan untuk sosialisasi, pembinaan dan evaluasi calon jemaah haji tahun 2021. Karena situasi masih dalam kondisi pandemi covid-19 sehingga pemberangkatan calon jemaah haji tahun 2021

dibatalkan. Realisasi kegiatan tidak dapat dilaksanakan.

1.2.18. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)

Dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 60.010.000,00. Alokasi anggaran ini bersumber dari Dana Insentif Daerah (DID) dengan realisasi sebesar Rp. 14.611.800,00 (24,35%) yang dipergunakan untuk sosialisasi, pembinaan dan evaluasi pelayanan kesehatan orang dengan masalah kesehatan jiwa (ODMK).

1.2.19. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA

Dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 20.000.000,00. Alokasi anggaran ini bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Rokok (DBHCT) tahun 2021 yang dipergunakan untuk pertemuan penggalangan komitmen dalam penatalaksanaan penyalahgunaan NAPZA, evaluasi dan monitoring kegiatan. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini tidak dapat direalisasikan dikarenakan kondisi pandemi covid-19 yang membatasi kegiatan tatap muka atau berkumpulnya orang yang dapat meningkatkan penyebaran virus covid-19.

1.2.20. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 204.688.250,00. yang dialokasikan untuk

- Pertemuan edukasi, sosialisasi, monitoring dan evaluasi kegiatan penyakit menular dan tidak menular dengan alokasi anggaran sebesar Rp.

45.000.000,00 yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) tahun 2021. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini tidak dapat direalisasikan dikarenakan kondisi pandemi covid-19 yang membatasi kegiatan tatap muka atau berkumpulnya orang yang dapat meningkatkan penyebaran virus covid-19.

- Pertemuan advokasi, sosialisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan covid-19, penyusunan perencanaan kegiatan. Alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 yang bersumber dari Dana Insentif Daerah (DID) tahun 2021. Alokasi anggaran tidak direalisasikan dikarenakan kondisi pandemi covid-19 yang membatasi kegiatan tatap muka atau berkumpulnya orang yang dapat meningkatkan penyebaran virus covid-19. Kegiatan dilaksanakan secara daring/virtual.
- Pertemuan Workshop penanggulangan penyakit menular dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 38.600.000,00 bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kesehatan tahun 2021. Kegiatan inipun tidak dapat dilaksanakan karena kondisi pandemi covid-19. Kegiatan dilakukan secara daring/virtual.
- Pembayaran hutang kegiatan tahun 2020 sebesar Rp. 71.088.250,00 (terrealisasi 100%).

1.2.21. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

Sub Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 65.217.075.758,00

terserap sebesar Rp. terserap sebesar

Rp. 23.810.048.759,00 (36,51%). Pencapaian kegiatan sebesar 100 persen berupa pembayaran klaim Rumah Sakit dan Puskesmas bagi pasien yang menggunakan fasilitas program pelayanan kesehatan masyarakat jaminan kesehatan masyarakat perkotaan sebanyak 178.637 orang. Pembayaran klaim ini bagi rumah sakit pemerintah dan swasta yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Kota Bandar Lampung (13 Rumah Sakit) dan 31 Puskesmas.

Tabel 3.2. Data Kunjungan Pasien Pengobatan Gratis Kota Bandar Lampung Tahun 2015-2021

No	Sarana	Kunjungan Pasien (Tahun)							Keterangan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Rumah Sakit	41.852	34.425	25.585	18.219	18.166	10.991	19.882	Data diperoleh sampai Bulan November
2.	Puskesmas	341.479	363.169	281.866	242.184	140.941	186.505	158.755	
	Jumlah	383.331	397.594	307.451	260.403	159.107	197.496	178.637	

1.2.21.Operasional Pelayanan Puskesmas

Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 93.708.113.500,00 terserap/terrealisasi sebesar Rp. terserap sebesar Rp. 82.922.307.201,02 atau mencapai 88,49.Pencapaian kegiatan sebesar 100 persen berupa :

- Belanja BLUD yaitu pencatatan dan pelaporan belanja BLUD (31 Puskesmas) sebesar Rp. 66.696.846.000,00.
- Biaya operasional Puskesmas Rp. 1.578.800.000. Biaya operasional ini merupakan dukungan dana dari APBD untuk operasional rutin Puskesmas seperti pembayaran tagihan

listrik, tagihan sampah dan operasional rutin lainnya.

- Bantuan Operasional Puskesmas (BOK) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kesehatan tahun 2021. Anggaran dipergunakan untuk dukungan kegiatan pelayanan di 31 Puskesmas terutama pelayanan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat). Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 17.189.833.000,00 dengan realisasi anggaran Rp. 13.296.492.000,00 (77,35%).
- Dukungan operasional instalasi gudang farmasi (IFK) Dinas Kesehatan sebesar Rp. 195.002.000,00. Anggaran digunakan untuk distribusi obat dari IFK ke 31 Puskesmas. Anggaran juga dipergunakan untuk operasional penerapan aplikasi e-logistik (aplikasi pencatatan dan pelaporan penggunaan obat). Realisasi anggaran sebesar Rp. 8.115.002,00 dengan sisa pembayaran kegiatan akan dilakukan pada tahun anggaran 2022.
- Pembayaran hutang kegiatan BOK tahun 2020 sebesar Rp. 8.047.642.500,00 (realisasi 100%).

1.2.22. Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya

Dukungan anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 13.902.420.228,00 sumber anggaran APBD Kota Bandar Lampung. Realisasi anggaran Rp. 7.465.727.850,00 (53,70%). Belum maksimalnya realisasi anggaran dikarenakan adanya efisiensi anggaran yang dipergunakan untuk penanggulangan pandemi covid-19. Selain itu

kondisi pandemi covid-19 juga membatasi kegiatan tatap muka kader Posyandu dan Poskeskel dalam kegiatannya kesehatan dalam upaya mencegah penularan/penyebaran covid-19. Kegiatan yang semula dilakukan secara langsung (tatap muka) pada saat pandemi covid-19 dilakukan secara virtual, melalui komunikasi telepon maupun komunikasi lainnya. Realisasi pencapaian kinerja output sebesar 53,70 persen berupa tersalurnya bantuan biaya operasional Posyandu dan Poskeskel sebanyak 704, yaitu untuk pembayaran transport kader Posyandu dan Poskeskel serta digunakan untuk pembayaran sewa gedung bangunan Poskeskel sebanyak 68 Poskeskel yang belum memiliki bangunan gedung sendiri dan 54 tempat Poskeskel lainnya adalah milik masyarakat yang di bangun dari dana pemerintah dan swasta. Dari anggaran tersebut juga dipergunakan untuk pembayaran hutang kegiatan tahun 2020 sebesar Rp. 2.705.221.933,00.

1.2.23. Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Dukungan anggaran untuk kegiatan ini Rp. 40.000.000,00 sumber anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DHCT). Realisasi anggaran Rp. 39.918.400,00 (99,80%). Output kegiatan berupa monitoring evaluasi kegiatan dan Transport Pendampingan Pengambilan Spesimen Penyakit Berpotensi KLB/Wabah di Rumah Sakit. Output kegiatan tercapai 100 persen.

1.3. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan

Dukungan anggaran untuk kegiatan ini Rp. 195.000.000,00 sumber anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DHCT). Realisasi anggaran Rp. 5.000.000,00 (2,5%) yang dipergunakan untuk updating portal web Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung sebagai sarana penyebarluasan informasi. Untuk penyediaan sarana virtual meeting tidak direalisasikan dikarenakan alokasi anggaran baru dimasukan dalam APBD Perubahan tahun 2021 pada Bulan Oktober, sehingga ketersediaan waktu untuk proses pengadaan tidak memungkinkan.

3.2.2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program ini terdiri dari 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan. Total anggaran program ini sebesar Rp. 621.251.000,00. Output kinerja dari program adalah Persentase Sumber daya manusia kesehatan dengan kompetensi sesuai standar 71 persen dan persentase Puskesmas dengan 9 Jenis tenaga kesehatan sesuai standar sebesar 59 persen. Realisasi anggaran sebesar Rp. 439.222.858,00 (70,70%). Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.1. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya

Dukungan anggaran untuk kegiatan ini Rp. 425.000.000,00 dengan realiasasi sebesar Rp. 408.392.858,00 (96,09%) dengan rincian sebagai berikut :

2.1.1. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar

Sub kegiatan ini didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 400.000.000,00 yang dipergunakan

untuk pembayaran insentif tenaga kesehatan Non ASN dalam penanggulangan covid-19. Pembayaran insentif sampai dengan Bulan Agustus 2021 sebesar Rp. 399.642.858,00 (99,91%). Sumber anggaran untuk pembayaran insentif tenaga kesehatan ini berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU).

2.1.2. Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan. Alokasi anggaran Rp. 25.000.000,00 berasal dari Dana Insentif Daerah (DID) Tahun 2021, dengan output kegiatan adalah pertemuan petugas inventaris barang dalam upaya peningkatan kualitas pencatatan dan pelaporan barang. Realisasi sebesar Rp. 8.750.000,00 (35%), rendahnya realisasi anggaran karena kegiatan terbatas dilakukan secara daring/virtual. Hal ini dilakukan dalam upaya mengurangi penularan kasus covid-19.

2.1.3. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Alokasi anggaran kegiatan ini berasal dari DAK bidang kesehatan tahun 2021 Rp. 196.250.000,00. Dengan dukungan sub kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Output kegiatan berupa pembinaan, monitoring dan pertemuan peningkatan kapasitas petugas pengelola obat di Puskesmas. Kegiatan telah dilaksanakan namun untuk realisasi anggaran akan dilakukan pada tahun 2022.

3.2.3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman

Program ini terdiri dari 3 kegiatan dan 3 sub kegiatan. Total anggaran program ini sebesar Rp. 408.358.800,00. Dengan realisasi Output kinerja berupa terlaksananya pembinaan monitoring dan evaluasi sarana kefarmasian (apotek, toko obat) dan industri makanan rumah tangga yang ada di wilayah Kota Bandar Lampung. Realisasi anggaran sebesar Rp. 231.562.800,00 (56,71%). Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1.1. Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT). Kegiatan ini didukung dengan 1 sub kegiatan yaitu Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 159.185.000,00 dan realisasi Rp. 94.110.000,00 (59,12%). Anggaran ini berasal dari Dana Alokasi Khusus Badan penagawasan Obat Dan Makanan (BPOM) Kementerian Kesehatan Tahun 2021.
- 1.2. Penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga. Anggaran ini berasal dari Dana Alokasi Khusus Badan penagawasan Obat Dan Makanan (BPOM) Kementerian Kesehatan Tahun 2021 berjumlah Rp. 173.093.800,00 dengan realisasi Rp. 137.452.800,00 (79,41%). Output kegiatan adalah pembinaan monitoring kepada pelaku industri makanan dan minuman rumah tangga sehingga

dalam produksi sesuai dengan standar kesehatan. Untuk pelaksanaan kegiatannya didukung oleh satu sub kegiatan yaitu Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT Sebagai Izin Produksi Sertifikat Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh IRT.

- 1.3. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan produk makanan minuman Industri Rumah Tangga. Anggaran ini berasal dari Dana Alokasi Khusus Badan penagawasan Obat Dan Makanan (BPOM) Kementerian Kesehatan Tahun 2021 berjumlah Rp. 76.080.000,00. Output kegiatan adalah monitoring hasil produksi makanan rumah tangga yang beredar di masyarakat (post market). Kegiatan dapat dilaksanakan 100 persen dengan realisasi anggaran akan dibayarkan pada tahun anggran 2022.

3.2.4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program ini terdiri dari 3 kegiatan dan 3 sub kegiatan. Total anggaran program ini sebesar Rp. 400.000.000,00. Dengan realisasi output kinerja berupa terlaksananya pembinaan monitoring dan evaluasi sarana kefarmasian (apotek, toko obat) dan indsutri makanan rumah tangga yang ada di wilayah Kota Bandar Lampung. Realisasi anggaran sebesar Rp. 46.147.500,00 (11,54%). Belum maksimalnya realisasi dikarenakan kondisi pandemi covid-19 yang membatasi pelaksanaan kegiatan secara tatap muka, selain itu juga masih ada pembayaran kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2022.

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pencapaian kinerja yang telah dijelaskan pada Bab sebelumnya berdasarkan target-target Penetapan Kinerja (TAPKIN) Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Tahun 2021, dapat disimpulkan:

1. Untuk indikator kinerja penurunan angka kematian ibu dan bayi Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung telah mampu untuk menekan jumlah kasusnya, sehingga angka capaian kegiatan dibawah target yang telah ditetapkan. Untuk angka kematian ibu capaian kinerja 3/100.000 kelahiran hidup lebih rendah dari target yaitu 5/100.000 kelahiran. Untuk angka kematian bayi hasil capaian kinerja mampu ditekan 3/1.000 kelahiran hidup dari target kinerja 5/1.000 kelahiran hidup.
2. Indikator kinerja prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita dan Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta di Tahun 2021 Dinas Kesehatan juga telah mampu menekan jumlah kasusnya hingga capaian kinerja masih dibawah target yang telah ditetapkan yaitu masing-masing sebesar 4.09 persen untuk kasus underweight, jumlah ini lebih rendah dari target sebesar 13 persen. Untuk kasus stunting hasil capaian kinerja sebesar 6,65 persen, masih lebih rendah dari target sebesar 18 persen.
3. Untuk realisasi anggaran di tahun 2021 dari jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 333.105.681.174,00, dapat direalisasikan sebesar Rp. 248.421.985.243,02 (74,58%). Belum maksimalnya realisasi anggaran disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adalah kondisi pandemi covid 19 yang sampai saat ini masih terjadi. Beberapa kegiatan

koordinasi, peningkatan kapasitas petugas, sosialisasi, advokasi dan pelayanan langsung kepada masyarakat tidak dapat dilakukan secara maksimal, Kegiatan yang melibatkan kerumunan ataupun berkumpulnya banyak orang tidak dapat dilakukan, hal ini untuk mencegah penularan covid 19 di masyarakat, kegiatan dilakukan secara terbatas dan secara virtual.

4.2. PEMECAHAN MASALAH

Upaya yang perlu dilakukan untuk memaksimalkan realisasi anggaran pada tahun berikutnya adalah sebagai berikut :

1. Melakukan sinkronisasi terkait penjadwalan pelaksanaan kegiatan, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan.
2. Meningkatkan peran lintas sektor dan lintas program untuk keberhasilan kegiatan yang akan dilaksanakan misalnya dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung.
3. Meningkatkan peran serta masyarakat untuk keberhasilan pelaksanaan kegiatan, peningkatan peran kader kesehatan yang ada di Posyandu maupun Poskeskel terutama dalam hal promotif dan preventif (pencegahan) penyakit.

Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA BANDAR LAMPUNG



DESTI MEGA PUTRI, SP, MT
Nip. 19691202 199503 2 002